

**PELAKSANAAN PEMEKARAN KAWASAN TRANSMIGRASI
MENJADI KOTA TERPADU MANDIRI (KTM)
DI KECAMATAN SILAUT
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Tim penguji Skripsi Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan
sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan*



Oleh:

**ENDAH DEWI NURHAYATI
NIM:84597/2007**

**PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

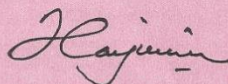
Judul : Pelaksanaan Pemekaran Kawasan Transmigrasi menjadi Kota
Terpadu Mandiri (KTM) di Kecamatan Silaut Kabupaten
Pesisir Selatan.

Nama : Endah Dewi Nurhayati
TM/NIM : 2007/84597
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Juli 2013

Disetujui oleh:

Pembimbing I,



Drs. Karjuni dt. Maani. M.Si
NIP. 19630617 198903 1 003

Pembimbing II



Henni Muchtar, SH. M.Hum
NIP. 19640305 199003 2 010

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

Pada hari Kamis 25 juli 2013 Pukul 08.30 s/d 10.30 WIB

PELAKSANAAN PEMEKARAN KAWASAN TRANSMIGRASI MENJADI KOTA TERPADU MANDIRI (KTM) DI KECAMATAN SILAUT KABUPATEN PESISIR SELATAN

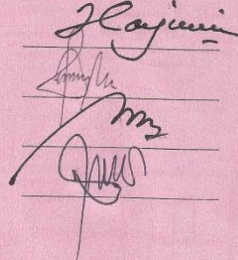
Nama	: Endah Dewi Nurhayati
TM/NIM	: 2007/84597
Program studi	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan	: Ilmu Sosial Politik
Fakultas	: Ilmu Sosial

Padang, 25 juli 2013

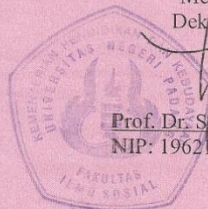
Tim Penguji:

Nama	
Ketua	: Drs. Karjuni dt. Maani.M.Si
Sekretaris	: Henni Muchtar, SH.M.Hum
Anggota	: Afriva Khaidir, M.Hum.MAPA.Ph.D
Anggota	: Drs. Syamsir, M.Si.Ph.D

Tanda Tangan



Mengesahkan:
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP: 19621001 198903 1 002

ABSTRAK

Endah Dewi Nurhayati: NIM 2007/84597. Pelaksanaan Pemekaran Kawasan Transmigrasi Menjadi Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemekaran kawasan Transmigrasi menjadi Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan. Masalah difokuskan kepada pelaksanaan Kota Terpadu Mandiri yang meliputi faktor penyebab tidak terlaksananya pembangunan Kota Terpadu mandiri (KTM) serta upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM).

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, penelitian ini hanya membuat deskripsi, gambaran tentang keadaan sebagaimana adanya. Lokasi penelitian ini di kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan. Informan penelitian ditentukan melalui teknik *purposif sampling* dan yang menjadi informan adalah Camat, Wali Nagari, Kepala Kelompok kerja (POKJA), kepala Tim Pelaksana Lapangan, tokoh masyarakat serta masyarakat yang dianggap mengetahui tentang pemekaran Kota Terpadu Mandiri di Kecamatan Silaut. Jenis dan sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik menguji keabsahan data dengan cara perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pemeriksaan teman sejawat. Teknis analisis data melalui tahap reduksi data, klasifikasi data, interpretasi data, dan pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Kawasan Transmigrasi menjadi Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kecamatan Silaut merupakan implementasi dari pengembangan kawasan transmigrasi, dan terbentuknya Kota terpadu Mandiri adalah dari usulan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dan DPRD kemudian dikoordinasikan oleh Pemerintah Provinsi serta lolos seleksi dari tim Pemerintah. Hal ini dikarenakan oleh dua faktor yaitu dari pihak pemerintah yaitu (1) kurangnya biaya operasional dari pemerintah (2) masih rendahnya Sumberdaya Manusia (SDM) dalam pelaksanaan KTM di lapangan, (3) sulitnya pemilikan atas hak tanah, (4) komunikasi dan listrik yang sering padam. Sedangkan dari pihak masyarakat yaitu (1) pemilikan atas hak tanah (2) dan kurangnya kesadaran masyarakat atas program kota terpadu mandiri di kawasan transmigrasi. Sedangkan upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mengatasi penyebab tidak terlaksananya pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM) adalah dengan melakukan (1) sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat, (2) penambahan tenaga operasional di lapangan, (3) penambahan dana untuk pelaksanaan Kota terpadu Mandiri (4) perbaikan jaringan komunikasi dan listrik. Dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan ini diharapkan Kota terpadu Mandiri Di Kawasan Transmigrasi dapat berjalan dengan baik.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Pelaksanaan Pemekaran Transmigrasi menjadi Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Srata Satu (S1), Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan pada Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Terima kasih kepada Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si selaku Pembimbing I, dan Ibu Henni Muchtar, SH, M.Hum. selaku pembimbing II, yang telah memberikan ilmu, pengarahan, bimbingan, masukan, serta waktu bimbingan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendorong penulis untuk menyelesaikan Studi dan Skripsi ini. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Bapak-bapak dan Ibu-Ibu Staf Pengajar Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Padang khususnya Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.

-
4. Teristimewa untuk kedua orangtua dan segenap keluarga penulis atas segala do'a, motivasi, dan dukungan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.
 5. Teman-teman mahasiswa Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang dan rekan-rekan seperjuangan atas motivasi, saran, dan informasi yang sangat berguna.
 6. Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses perkuliahan dan penulisan skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan dan diridhoi oleh Allah SWT.

Dengan pengetahuan serba terbatas penulis berusaha menyajikan skripsi ini walaupun dapat dikatakan masih belum sempurna. Untuk itu saran dan kritik yang konstruktif dan edukatif penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kat, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Padang, April 2013

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Fokus Penelitian.....	9
F. Tujuan Penelitian.....	9
G. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Teoritis.....	11
1. Pelaksanaan Pemekaran KTM.....	11
2. Faktor penyebab tidak terlaksananya pelaksanaan pemekaran KTM.....	32
3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengatasi faktor penyebab tidak terlaksanya Pemekaran KTM.....	34
B. Kerangka Konseptual.....	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian	38
C. Informan Penelitian	39

D. Jenis dan Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Teknik Menguji Keabsahan Data.....	42
G. Teknik Analisis Data.....	44

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum.....	46
B. Temuan Khusus.....	55
C. Pembahasan.....	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	91
B. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL	HALAMAN
Tabel 3.1.....	39
Tabel 3.2.....	40
Tabel 4.1.....	48
Tabel 4.2.....	49
Tabel 4.3.....	52
Tabel 4.4.....	54
Tabel 4.5.....	55

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian dari Fakultas
2. Surat Izin Penelitian dari pemerintahan daerah Kabupaten Pesisir Selatan
3. Surat telah selesai Penelitian dari Kecamatan Silaut
4. Daftar Pedoman Wawancara
5. Daftar Informan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan satu bagian utama dari alam dan lingkungan yang kompleks. Kegiatan-kegiatan seperti perkembangan penduduk dan perkembangan industri serta pembangunan daerah. Globalisasi harus dihadapi karena tidak mungkin dapat dihindari, dalam era globalisasi masalahnya bukan hanya sekedar berdaulat dalam bidang politik, bidang ekonomi, dan kepribadian dalam bidang sosial budaya, tetapi juga harus unggul dalam persaingan global. Saat ini, di Indonesia tantangan terhadap kebudayaan kita datang dari perubahan global yang disebabkan oleh dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga dari tekad kita untuk menyelenggarakan industrialisasi dan perubahan sosial budaya.

UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu dalam rangka memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pembangunan Indonesia yang berorientasi kepada pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan, yaitu pembangunan dengan penghematan penggunaan sumber daya dan pertimbangan jauh kedepan. Poespowardjo soerjanto (2004:36) Dengan kata lain, pembangunan memenuhi kebutuhan generasi mendatang. Laju pembangunan ditentukan oleh sumber daya manusia dan sumber daya alam. Antara pembangunan, sumber daya alam, dan sumber daya manusia terdapat hubungan yang timbal balik.

Seperti dalam pidato presiden RI pada sidang paripurna DPR tanggal 16

Agustus 2006 yaitu :

“Pidato kenegaraan Presiden RI tanggal 16 Agustus 2006 antara lain menyatakan bahwa kebijakan pengurangan ketimpangan pembangunan wilayah salah satunya adalah dengan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) dikawasan transmigrasi, untuk membangkitkan sektor riil antara lain pertanian, perdagangan dan industri pengolahan bahan baku.”

Arief (2001:25) Wilayah Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan RI yang secara geografi memiliki beribu-ribu pulau, serta dengan jumlah penduduk yang sangat besar, persebaran yang belum serasi dan belum seimbang antara daya dukung alam dan daya tampung lingkungan. Kondisi tersebut apabila tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan kerawanan sosial ataupun kerusakan lingkungan. Persebaran penduduk yang belum serasi dan belum seimbang menyebabkan pembangunan nasional belum merata sehingga ada kecendrungan daerah atau wilayah yang telah berkembang menjadi semakin berkembang. Sebaliknya masih banyak daerah atau wilayah yang kurang berkembang dan menjadi semakin tertinggal. Oleh karena itu penyebaran penduduk yang berupa tenaga kerja produktif untuk mengelola sumber daya alam yang potensial perlu diatur melalui penyelenggaraan transmigrasi.

Arief (2001:38) Program transmigrasi merupakan bagian integral dari program pembangunan nasional yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan permukiman yang layak huni, layak usaha, layak berkembang dan layak lingkungan, pengarahan dan penempatan serta pembinaan pengembangan transmigrasi dan masyarakat sekitar dalam upaya mengurangi kesenjangan pembangunan antara daerah atau wilayah. Kebijakan transmigrasi ditempuh

pemerintah karena penyebaran penduduk dikawasan negara ini di anggap tidak seimbang. Ada daerah –daerah yang terlalu padat penduduknya dan ada yang terlalu jarang. Sehingga kehidupan penduduk dan perkembangan daerah beserta masyarakatnya tidak seperti yang diharapkan.

Dalam Undang-undang No.29 tahun 1960 diatur tentang pokok-pokok penyelenggaraan transmigrasi dan Undang-undang No. 5 tahun 1965 tentang gerakan nasional transmigrasi. Maka pada tahun 1972 pemerintah dengan mencabut Undang-Undang sebelumnya kemudian menetapkan Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok transmigrasi yang tercantum dalam Undang-Undang No. 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian pada bab 1 pasal 1 ayat 4 yang berbunyi :“Bahwa wilayah pengembangan transmigrasi (WPT) adalah wilayah potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman transmigrasi untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah yang baru sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.”Dalam pasal tersebut diformulasikan bahwa transmigrasi adalah pemindahan dan atau perpindahan penduduk dari suatu daerah untuk menetap ke daerah lain yang ditetapkan dalam wilayah RI guna kepentingan pembangunan negara atau alasan-alasan yang dipandang perlu oleh pemerintah berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang.kemudian dalam bab-bab berikutnya dikatakan bahwa sasaran kebijakan umum transmigrasi adalah untuk mencapai :

- a. Peningkatan taraf hidup yang lebih baik
- b. Pembangunan daerah
- c. Keseimbangan penempatan penduduk

- d. Pembangunan yang merata diseluruh Indonesia
- e. Kesatuan dan persatuan bangsa
- f. Memperkuat pertahanan dan kemandirian nasional.

Dan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI No. 129 tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah yang Efektif berlaku sejak tanggal 13 Desember 2000. Hal ini menyebabkan semakin besarnya tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan pemerataan dalam bidang pembangunan(development). Oleh karena itu untuk mempercepat terwujudnya pusat-pusat pertumbuhan baru, menata kembali kawasan-kawasan transmigrasi yang relatif belum berkembang, serta menarik minat kaum muda untuk ikut program transmigrasi, maka program transmigrasi dikemas dengan membangun Kota Terpadu Mandiri (KTM) di kawasan transmigrasi. Kemudian pemerintah Daerah pun melihat bahwa Kecamatan Lunang Silaut mempunyai potensi yang mendukung untuk dijadikan kota terpadu mandiri.

Dengan dikeluarkannya surat Keputusan Bupati Nomor 214/2007 tentang Pelaksanaan Kota Terpadu Mandiri di Kecamatan Silaut. Kecamatan Silaut merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan yang dijadikan Kota Terpadu Mandiri yang di mulai pada tahun 2007. Kecamatan Silaut ini awalnya adalah daerah transmigrasi. Alasan dijadikannya Kota Terpadu Mandiri di Kecamatan Silaut karena daerah transmigrasinya sudah cukup maju, masyarakatnya sebagian besar petani dan akses jalan darat (lintas barat sumatera) yang kemudian dapat dijadikan Kota Terpadu Mandiri. bentuk dari

program Kota Terpadu Mandiri diantaranya adalah pembangunan disegala aspek, misalnya jalan, pasar, tempat ibadah.

Lilawati dalam (Sandjaja, 2009. <http://mathedu-unila.blogspot.com>) Program Kota Terpadu Mandiri dirancang secara holistik dan komprehensif layaknya membangun kawasan transmigrasi yang bernuansa perkotaan. Dengan dibangunnya KTM maka akan terjadi keselarasan dan akselesari perekonomian pedesaan dan terwujudnya kawasan transmigrasi yang mandiri dan untuk mengurangi jumlah angka kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan, maka perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat dengan berbagai strategi yang digunakan untuk mensejahterakan masyarakat.

Lilawati dalam (Sandjaja, 2009. <http://mathedu-unila.blogspot.com>) pada dasarnya, pembangunan dan perkembangan Kota Terpadu Mandiri dikawasan transmigrasi adalah untuk menciptakan sentra-sentra agribisnis dan agroindustri yang mampu menarik investasi swasta, sebagai penggerak perekonomian para transmigran dan penduduk sekitar menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru, sekaligus untuk membuka kesempatan kerja dan peluang usaha. Dengan terbentuknya sentra-sentra agribisnis dan agroindustri dikawasan Kota Terpadu Mandiri maka diharapkan mampu meningkatkan kemudahan-kemudahan bagi para penduduk sekitar untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar masyarakat. Dan pada akhirnya apabila proses tersebut berjalan dengan lancar maka dengan sendirinya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dimashandoko dalam (paradigma baru KTM, 2012 <http://wordpress.blogspot.com>). Program ini diharapkan mampu mengurangi jumlah angka

kemiskinan dan mampu membuat masyarakat dapat lebih berdaya dalam sektor perekonomian dan mampu berdaya secara mandiri pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi masyarakat miskin dan pengangguran akibat tidak adanya lapangan pekerjaan. Sementara itu efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemekaran dari program Kota Terpadu Mandiri sangat dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, pengolahan potensi daerah, serta peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sedangkan kenyataan yang dirasakan masyarakat ternyata masih jauh dari harapan masyarakat.

Hal ini terlihat dari masih rendahnya kinerja pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat yang berada di bagian barat Kecamatan Lunang Silaut, masih rendahnya pembinaan kehidupan berdemokrasi, pelaksanaan pembangunan yang tidak selesai dan terkesan terbengkalai, seperti akses jalan dan pusat pelayanan masyarakat seperti pelayanan kesehatan dan gedung-gedung pemerintahan. .

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan pelaksanaan Kota Terpadu Mandiri di Kecamatan Lunang Silaut dinilai sudah cukup baik oleh pemerintah tetapi tidak oleh masyarakat. Masih ada masyarakat yang belum merasakan manfaat dari adanya program Kota Terpadu Mandiri, terutama bagi masyarakat miskin yang tidak merasakan dampak positif dari adanya Kota Terpadu Mandiri. Selain itu, dalam pembangunan sarana dan prasarana seperti jalan desa serta pembangunan-pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, dan

pelayan publik lainnya masih terbengkalai pembangunanya sejak tahun 2007. Padahal program Kota Terpadu Mandiri (KTM) ini sudah berjalan cukup lama, dari observasi awal ini penulis juga ingin mengetahui apakah program Kota Terpadu Mandiri (KTM) sudah sesuai dengan persyaratan dan kriteria dalam melaksanakan pemekaran suatu daerah.

Berdasarkan fenomena tersebut muncul pertanyaan apakah dalam pelaksanaan program Kota Terpadu Mandiri tersebut telah sesuai dengan program pelaksanaan yang telah ditetapkan? Apakah prinsip-prinsip pelaksanaan Kota Terpadu Mandiri telah digunakan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam program kebijakan Pemerintah? Berdasarkan paparan tersebut atau dari latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut dan membuat judul dari penelitian ini adalah “ **PELAKSANAAN PEMEKARAN TRANSMIGRASI MENJADI KTM (KOTA TERPADU MANDIRI) DI KECAMATAN SILAUT KABUPATEN PESISIR SELATAN**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas. Selanjutnya penulis mencoba mengidentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Lunang Silaut masih belum optimal.
- b. Tujuan pelaksanaan program Kota Terpadu Mandiri belum tercapai dengan baik.

- c. Masih kurangnya Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang masih rendah mengenai hukum dan kebijakan.
- d. Masih rendahnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pengembangan KTM yang dilakukan oleh Pemerintah.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dan keterbatasan waktu, biaya, serta kemampuan peneliti. Maka untuk memperoleh data yang akurat serta sasaran dan tujuan yang akan dicapai maka peneliti maka peneliti membatasi masalahnya hanya pada:

- 1) Pelaksanaan pemekaran Kota Terpadu Mandiri di pada kawasan Transmigrasi di Kecamatan Silaut.
- 2) Faktor penyebab tidak terlaksananya pembangunan Kota Terpadu Mandiri secara maksimal di Kecamatan Silaut.
- 3) Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengatasi kendala pelaksanaan Kota Terpadu Mandiri di Kecamatan Silaut.

D. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah pelaksanaan Pemekaran Kota Terpadu mandiri pada kawasan Transmigrasi di Kecamatan Silaut
- 2) Apa saja faktor penyebab tidak terlaksananya pembangunan Kota Terpadu Mandiri secara optimal di Kecamatan Silaut?
- 3) Upaya apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengatasi kendala pelaksanaan Kota Terpadu Mandiri di Kecamatan Silaut?

E. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini lebih fokus dan tidak mengambang karena keterbatasan dari kemampuan penulis, maka penulis membatasi pembahasannya sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Pemekaran kawasan Transmigrasi menjadi kota Terpadu Mandiri di Kecamatan Silaut
- 2) Faktor penyebab tidak terlaksananya pembangunan Kota Terpadu Mandiri secara optimal di Kecamatan Silaut.
- 3) Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi faktor penyebab tidak terlaksananya Kota Terpadu Mandiri di Kecamatan Silaut.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Mengetahui pelaksanaan pemekaran Kota Terpadu Mandiri pada Kawasan Transmigrasi di Kecamatan Silaut.
- 2) Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab tidak terlaksananya Kota Terpadu Mandiri secara optimal di Kecamatan Silaut.
- 3) Mengidentifikasi upaya apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengatasi kendala pelaksanaan Kota Terpadu Mandiri di Kecamatan Silaut.

G. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis yaitu sebagai sumbangan pikiran bagi perkembangan konsep ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan Sistem Pemerintah Daerah.

2. Manfaat praktis yaitu sebagai sumbangan pemikiran bagi pembaca untuk lebih memahami tentang pemekaran transmigrasi menjadi Kota Terpadu Mandiri, pelaksanaanya, kendala-kendala, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemekaran Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kecamatan Silaut ini berawal dari adanya kawasan transmigrasi. Kecamatan Silaut memiliki komoditas unggulan di bidang perkebunan kelapa sawit hal inilah yang menjadi alasan terbentuknya Kota Terpadu Mandiri di Kecamatan Silaut.
2. Faktor penyebab tidak berjalanya pelaksanaan Kota Terpadu Mandiri (KTM). Faktor tersebut berasal dari pihak pemerintah dan dari pihak masyarakat. Dari pemerintah meliputi : kurangnya dana atau biaya operasional lapangan, kurangnya Sumberdaya Manusia (SDM) untuk pelaksanaan operasional di lapangan, sulitnya mendapatkan hak atas tanah yang akan dijadikan kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM), dan susahny komunikasi serta listrik yang sering padam. Sedangkan dari pihak masyarakat meliputi : pemilikan hak tanah, dan kesadaran warga masyarakat yang rendah tentang Program Kota Terpadu Mandiri (KTM).
3. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi faktor penyebab tidak terlaksananya pembangunan Kota Terpadu Mandiri adalah dengan melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada seluruh warga masyarakat.

B. SARAN

1. Bagi Pemerintah daerah harus menyediakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk pelaksanaan Kota Terpadu Mandiri (KTM) yang dapat memberikan atau membantu jalanya program KTM sehingga dapat memberi hasil dan manfaat bagi masyarakat secara berkesinambungan.
2. Agar program ini dapat ditangani lebih serius lagi supaya masyarakat bisa merasakan manfaat dari program Kota Terpadu Mandiri ini (KTM).
3. Bagi masyarakat juga harus berfikir positif terhadap adanya suatu pembangunan dan harus lebih terbuka lagi dengan suatu perubahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Mardalis. 1989. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Bintaro, 2000. *Interaksi Desa-Kota*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Budiman, Arief. 2001. *Transmigrasi di Indonesia*. Jakarta : Gramedia.
- Keyfitz, Nathan. 1964. *Sosial penduduk dan pembangunan indonesia*. Jakarta : PT Pembangunan.
- Kotler, Philip. 2000. *Marketing Manajemen: Analysis, Planning, implementation, and Control*. 9th Edition, Prentice Hall International, Int, New Yersey.
- Lexy J, Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Mar'at, 1991. *Sikap Manusia Perubahan Serta Pengukurannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mulyono, Sadyohatomo Mulyono. 2008. *Manajemen Kota dan Wilayah*. Bandung : Bumi Akasara.
- Nangoi, Ronald. 2003. *Transmigrasi Industri*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Poespowardojo, soerjanto. 2004. *Pembangunan Nasional dalam Perspektif Budaya*. Jakarta : Gramedia.
- Riwu, Josef. 2002. *Prospek Otonomi Daerah di Negara RI*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Robbins, S.P. 2003. *Perilaku Organisasi*. Jilid I. Jakarta: Garmedia
- Rosyadi, I. 2001. *Keunggulan kompetitif berkelanjutan melalui capabilities-based competition: Memikirkan kembali tentang persaingan berbasis kemampuan*. Surakarta: FakultasEkonomiUniversitasMuhammadiyah.
- Said, Rusli. 2005. *Pengantar ilmu kependudukan*. Jakarta : Erlangga
- Sugandhy, Aca. 2007. *Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sumanto. 1995. *Metode Penelitian Kualitatin dan Kuantitatif*. Jakarta : Gramedia.